



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I WAYAN SUKRA WARPALA
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 972017

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.735.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 430 m²/184 m² di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 615.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m²/192 m² di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 740.000.000
3. Tanah Seluas 144 m² di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
4. Tanah Seluas 80 m² di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 80 m² di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **169.750.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.250.000
2. MOBIL, TOYOTA CALYA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
4. MOTOR, HONDA PCX BEBEK Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000



5. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
5.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 41.580.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 53.057.800

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.999.387.800

III. HUTANG Rp. 1.190.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 809.387.800

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.